

RILIS MEDIA

ROAD TO 2024 ELECTIONS

MASA DEPAN PEMBANGUNAN DAN DEMOKRASI: MENAKAR KOMITMEN CAPRES 2024

SENIN, 26 JUNI 2023

Populi Center, lembaga penelitian kebijakan dan opini publik yang bersifat non-profit, menyelenggarakan Survei Nasional mulai tanggal 5 hingga 12 Juni 2023. Sampel responden tersebar secara proporsional di 38 provinsi di Indonesia, termasuk di 4 (empat) Daerah Otonomi Baru yaitu Papua Tengah, Papua Barat Daya, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Tujuan survei untuk mengetahui persepsi masyarakat terutama terkait kinerja Pemerintah, kinerja Kepolisian, dinamika jelang pemilihan umum tahun 2024, serta isu nasional yang sedang menjadi perbincangan. Selain itu, kami juga berupaya melihat kondisi kesetaraan gender dari sudut pandang masyarakat. Survei ini dilakukan dengan menggunakan pendanaan internal.

Metode pengambilan data dalam survei ini dilakukan melalui wawancara tatap muka (*face to face interview*) dilakukan dengan menggunakan aplikasi survei Populi Center kepada 1.200 responden yang dipilih menggunakan metode acak bertingkat (*multistage random sampling*). *Margin of Error* (MoE) diperkirakan $\pm 2,83$ persen dan tingkat kepercayaan 95 persen.

EVALUASI PEMERINTAHAN JOKO WIDODO

Data menunjukkan, masyarakat semakin mengapresiasi **kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi)**. Ini terlihat dari **kenaikan tingkat kepuasan** dari 75,4 persen pada Mei 2023 menjadi 77,8 persen pada bulan ini. Sementara itu, yang menjawab tidak puas dengan kinerja Presiden Jokowi saat ini jumlahnya sebesar 20,7 persen, dan yang tidak menjawab sebesar 1,5 persen.

Tingginya tingkat kepuasan terhadap kinerja Presiden Jokowi diikuti dengan harapan besar dari masyarakat agar **program yang ada saat ini dapat diteruskan oleh presiden selanjutnya**. Program **bantuan sosial** (33,6 persen) dan **pembangunan infrastruktur** (19,6 persen) menjadi dua hal yang paling banyak diharapkan oleh masyarakat agar diteruskan oleh presiden mendatang. Kemudian terdapat pula program **pemerataan pembangunan** (4 persen), **bantuan pendidikan** (3,8 persen), dan **Pembangunan Ibu Kota Negara** (3,7 persen).

Dibandingkan dengan temuan survei sebelumnya, terdapat peningkatan penilaian baik terkait demokrasi di Indonesia saat ini. Sebesar 76,1 persen masyarakat menjawab pelaksanaan **demokrasi Indonesia berjalan baik**, naik sekitar 8 persen dari survei bulan Mei 2023. Sejalan dengan itu, yang menjawab demokrasi berjalan tidak baik jumlahnya menurun, dari 26,7 persen pada survei sebelumnya, menjadi 19,2 persen pada bulan ini. Diduga, meningkatnya penilaian baik terhadap jalannya demokrasi sedikit banyak disebabkan adanya isu pertemuan antara Ketua DPP PDIP Puan Maharani dan Ketua Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono yang muncul pada minggu ke dua bulan Juni, yang kemudian mempengaruhi penilaian masyarakat terhadap pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Wacana pertemuan antara ke dua partai yang telah lama berseteru tersebut menjadi penanda semakin dewasanya elit politik, sesuatu yang menjadi penting bagi tumbuh kembang demokrasi kita.

Dari sejumlah lembaga yang disebutkan, **TNI** (85,7 persen), **Presiden** (80,1 persen) dan **Polri** (72,7 persen) menjadi **tiga lembaga dengan tingkat kepercayaan tertinggi**. Kemudian menyusul di bawahnya ialah KPU (71,5 persen), KPK (69,9 persen), Bawaslu (69,6 persen), MA (67,9 persen), Kejaksaan Agung (67,3 persen), MK (66,2 persen), BPK (64,9 persen), DPR RI / DPRD (63,3 persen), DPD RI (61,3 persen) dan Partai Politik (59,3 persen).

Jelang HUT ke 77 Bhayangkara pada 1 Juli mendatang, kami menanyakan pandangan masyarakat mengenai layanan dan netralitas Polri. Dalam hal pelayanan, masyarakat menilai pelayanan dari kepolisian yang paling merepotkan dan menyita waktu ialah pembuatan SIM (24,8 persen), kemudian laporan kasus (17,3 persen), balik nama kendaraan (12,3 persen), perpanjangan STNK (6,3 persen), izin keramaian (5,8 persen), perpanjangan SIM (5,8 persen), dan SKCK/catatan kepolisian (3,7 persen). Masyarakat juga nampak menaruh harapan tinggi terhadap Polri berkaitan pesta demokrasi mendatang. **Mayoritas masyarakat**, yakni sebesar 70,1 persen, percaya bahwa **kepolisian akan bertindak netral (tidak berpihak) dalam pemilu**. Hanya 24,3 persen yang menjawab tidak percaya, dan sisanya menolak memberikan jawaban.

ISU NASIONAL

Beberapa waktu lalu, **Presiden Joko Widodo** mengungkapkan bahwa demi bangsa dan negara, presiden akan **cawe-cawe (ikut campur) pada pemilu 2024 mendatang**. Kami mencoba melihat bagaimana sikap masyarakat terhadap pernyataan presiden tersebut. Hasilnya, sebesar 43,8 persen menjawab mendukung **pernyataan presiden**, dan sebesar 44,9 persen menjawab **tidak mendukung**. Sisanya sebesar 11,3 persen menolak menjawab pertanyaan ini. Kami juga menanyakan persepsi yang berkembang di masyarakat terkait pernyataan *cawe-cawe* Presiden Jokowi. Sebesar 31,5 persen masyarakat beranggapan maksud dari pernyataan tersebut adalah **Presiden ingin memastikan bahwa pembangunan dilanjutkan oleh presiden berikutnya**. Kemudian sebesar 29,2 persen beranggapan bahwa **Presiden menjamin pelaksanaan pemilu akan dilakukan dengan jujur dan adil**. Hanya sebesar 21,8 persen yang menganggap **Presiden akan mendukung salah satu calon** presiden di Pemilu 2024. Sisanya menolak menjawab pertanyaan ini.

Selain pernyataan *cawe-cawe* presiden, terdapat pula penetapan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate sebagai tersangka kasus korupsi BTS. Persepsi publik terbelah dalam menyikapi kasus penetapan tersebut. Sebesar 28 persen masyarakat beranggapan penangkapan tersebut **murni kasus hukum**, sedangkan yang menilai **penangkapan tersebut bersifat politis** jumlahnya sebesar 24,8 persen. Terdapat 43,3 persen yang tidak mengetahui perihal kasus tersebut, dan sisanya menolak menjawab.

Pada isu lainnya, sebagian besar masyarakat nampak cukup puas dengan **Ketua Umum PSSI** saat ini. Sebesar 52,5 persen masyarakat menganggap kepemimpinan Erick Thohir **berhasil** sebagai ketua umum PSSI sejauh ini. Sedangkan sebesar 17,5 persen menjawab **cukup berhasil**, kemudian 5,9 persen menjawab tidak berhasil. Hanya 2,7 persen yang menjawab gagal, dan sisanya menolak menjawab.

Ketika masyarakat ditanya siapakah politisi muda calon pemimpin masa depan yang layak dipertimbangkan menjadi pemimpin nasional, **Agus Harimurti Yudhoyono** merupakan nama yang paling banyak dipilih dengan 31,8 persen. Diikuti oleh **Gibran Rakabuming Raka** (30,3 persen), **Kaesang Pangarep** (4,4 persen), **Ahmad Sahroni** (3,4 persen), **Emil Dardak** (3,2 persen), **Airin Rachmi Diany** (2,5 persen), **Bobby Aff Nasution** (2,2 persen), dan **Yaqut Cholil Qoumas** (2,1 persen). Sementara nama-nama lain mendapat perolehan kurang dari 1 persen.

ISU PEREMPUAN

Pada survei kali ini kami juga menggali persepsi masyarakat mengenai urgensi posisi ibu negara, kesetaraan perempuan, kondisi umum terkait kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta akses kesehatan terhadap perempuan. Terkait dengan posisi Ibu Negara, sebesar **74,2 persen** masyarakat menjawab **seorang presiden laki-laki harus memiliki seorang istri agar terdapat posisi Ibu Negara saat memimpin**. Sementara sebesar **21,3** persen menjawab presiden laki-laki tidak harus memiliki seorang istri, dan sisanya tidak menjawab.

Kami juga menanyakan sejauhmana telah terdapat kesempatan yang sama antara laki-laki dengan perempuan dilihat dari beberapa aspek. Hasilnya, sebesar 94,1 persen masyarakat setuju bahwa saat ini telah terdapat **kesetaraan dalam mengakses pendidikan** (94,1 persen), diikuti dengan **kesetaraan dalam perlakuan dalam dunia kerja** (82,5 persen), serta **keterwakilan politik** (74,3 persen).

Data menunjukkan, sebesar 91,1 persen masyarakat menjawab persoalan **kekerasan terhadap perempuan dan anak** di Indonesia **masih mengkhawatirkan**. Sedangkan sebesar 6,7 persen menjawab **tidak mengkhawatirkan**, dan sisanya menolak menjawab. Penting juga untuk dicatat, bahwa 72,2 persen masyarakat beranggapan bahwa **kemampuan pemerintah dalam menghadirkan rasa aman bagi perempuan dan anak** di Indonesia sudah **baik**. Sedangkan sebesar 23,1 persen menjawab **buruk**, dan sebanyak 4,7 persen menolak menjawab.

Saat ditanya terkait **akses kesehatan reproduksi bagi perempuan** di Indonesia, sebesar **75,1 persen** masyarakat menjawab sudah **baik**. Sementara sebesar **18,6 persen** menjawab masih **buruk**, dan sisanya menolak menjawab.

DINAMIKA MENUJU PEMILU 2024

Pendaftaran pasangan calon presiden dan wakil presiden semakin dekat. Terdapat beberapa nama yang telah dideklarasikan oleh partai pendukungnya sebagai capres maupun cawapres. Sejauh mana masyarakat mengenal tokoh-tokoh yang dinilai potensial menjadi peserta Pilpres 2024? Data menunjukkan, **Prabowo Subianto** (96,8 persen) menjadi tokoh yang paling banyak dikenal oleh masyarakat, disusul **Anies Baswedan** (85,3 persen), **Ganjar Pranowo** (82 persen), **Sandiaga Uno** (81,3 persen), **Ridwan Kamil** (76,1 persen), **Gibran Rakabuming Raka** (71,6 persen), **Puan Maharani** (68,4 persen), **Agus Harimurti Yudhoyono** (64,1 persen), **Erick Thohir** (61,3 persen). Nama-nama lain mendapatkan pengenalan di bawah 60 persen.

Sejauh ini, Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo menjadi tokoh yang dianggap paling mungkin untuk berkompetisi dalam Pilpres. Kami menanyakan persepsi masyarakat terhadap tiga tokoh tersebut dinilai dari beberapa aspek. Hasilnya, **Prabowo Subianto** dinilai menjadi tokoh yang **mampu menjaga stabilitas keamanan, paling mampu mengatasi persoalan politik luar negeri, dan paling mampu memberantas korupsi**. Sementara itu, **Ganjar Pranowo** dinilai sebagai tokoh yang **paling sering mengunjungi warga (blusukan), paling mampu diterima semua kalangan, paling mampu mewujudkan solidaritas sosial, paling bagus dalam berpidato, paling mampu menjaga toleransi, paling mampu memimpin/bekerja, dan paling mampu menciptakan lapangan pekerjaan**. Dari sejumlah aspek yang ditanyakan tersebut, **Anies Baswedan** tidak muncul sebagai tokoh yang lebih dominan dibanding Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto dari aspek sejumlah aspek di atas.

Pada pertanyaan terbuka (top of mind) mengenai tokoh yang akan dipilih pada Pilpres 2024, data menunjukkan **Ganjar Pranowo** sebagai tokoh yang paling banyak dipilih oleh masyarakat sebagai **Presiden** apabila pemilihan presiden dilakukan hari ini, dengan 21,9 persen, disusul Prabowo Subianto (19,3 persen), dan Anies Baswedan (14,4 persen). Sementara untuk wakil presiden, **Sandiaga Uno** menjadi nama yang **paling banyak dipilih untuk menjadi wakil presiden** dengan 9,8 persen, disusul Ridwan Kamil (7,5 persen), dan Erick Thohir (5,9 persen).

Dinamika dukungan masyarakat kepada calon presiden cukup menarik untuk diperhatikan. Berdasarkan data tren, Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto menjadi dua tokoh yang memiliki tingkat elektabilitas yang cukup ketat. Dalam **simulasi tertutup 3 (tiga) tokoh, Ganjar Pranowo unggul** dengan 35,8 persen, disusul Prabowo Subianto (33,4 persen), dan Anies Baswedan (23,2 persen).

Dilihat dari **sebaran pilihan partai** yang akan dipilih pada pemilu legislatif untuk memilih anggota DPR RI mendatang, pemilih **Ganjar Pranowo** paling banyak datang dari mereka yang akan memilih PDI-P (77,6 persen) dan PKB (42,4 persen). Sementara pemilih **Prabowo Subianto** paling banyak berasal dari pemilih Partai Gerindra (78,2 persen), Partai Golkar (47,1 persen), PAN (40 persen), dan PPP (32,4 persen). Untuk **Anies Baswedan**, dukungan terhadapnya paling banyak berasal dari pemilih Nasdem (51,4 persen), PKS (63,4 persen), dan Partai Demokrat (46,2 persen).

Terkait dengan **pemilu legislatif**, apabila pemilihan untuk memilih anggota DPR RI dilakukan pada hari ini, **PDIP** menjadi partai dengan **tingkat keterpilihan tertinggi** dengan 20,8 persen. Kemudian diikuti Gerindra (11,8 persen), Golkar (10,1 persen), PKB (7,7 persen), PKS (6,8 persen), Demokrat (6,5 persen), Nasdem (6,2 persen), PAN (3,3 persen), dan PPP (3,1 persen). Sementara itu, di antara partai-partai non parlemen, Perindo menjadi partai yang mendapatkan keterpilihan paling tinggi yaitu dengan 2,5 persen. Diikuti dengan Hanura (1,0 persen), Partai Buruh (0,9 persen), Gelora (0,5 persen), PKN (0,5 persen), PBB (0,4 persen), PSI (0,4 persen), dan Garuda (0,3 persen).

Secara umum, hasil survei bulan ini menunjukkan bahwa publik cukup puas dengan kinerja Presiden Joko Widodo. Hal ini terutama terlihat dalam dua program utama yang paling banyak dipilih untuk diteruskan oleh presiden selanjutnya, yaitu bantuan sosial dan pembangunan infrastruktur, yang dinikmati oleh kelompok masyarakat bawah dan menengah-atas. Secara kuantitas, kedua kelas masyarakat tersebut jelas mendominasi dalam struktur masyarakat di Indonesia. Melihat kenyataan tersebut, tokoh-tokoh yang akan maju dalam Pilpres mendatang perlu dilihat sejauh mana komitmennya untuk mempertahankan arah pembangunan yang sedang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo, sembari terus melakukan perbaikan dalam kerangka meningkatkan kualitas kebijakan. Dengan kata lain, Pemilu 2024 menjadi penentu apakah Indonesia akan mampu melakukan lompatan dengan terpilihnya tokoh yang mampu meneruskan program pemerintah saat ini sebagai pijakan, atau justru mengalami stagnasi, atau bahkan kemunduran, dengan hadirnya tokoh yang memilih jalan yang berbeda sebagai presiden kelak.

Narahubung:

Hartanto Rosojati (Peneliti, Populi Center)

+62 812-2859-9876